

**KINERJA APARATUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA DI TENGAH
PANDEMI COVID-19**

Abdul Rahmat Burhan
NPP.28.1329
Asdaf Kabupaten Nabire, Provinsi Papua
Program Studi Manajemen Sumber Daya Aparatur

Email: rahmatburhann@gmail.com

Abstrack

In Compiling the Final Report, the author took the title "Performance of the Regional Disaster Management Agency Apparatus of Nabire Regency, Papua Province in the Midst of the COVID-19 Pandemic". The performance of the Nabire Regency BPBD apparatus is considered to have decreased. The purpose of the research is to identify how the BPBD apparatus performs, identify the obstacles faced, as well as the efforts made in overcoming and overcoming the obstacles. The method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Collecting data in the field using interview, observation and documentation techniques. The results show that the implementation of performance at BPBD Nabire Regency is based on the concept of 5 aspects of apparatus performance appraisal which include quality of work, timeliness, initiative, ability, and communication. Each has a fairly good value. As for the capability aspect, the dimensions of the apparatus' ability to meet the job targets are quite good, but the dimensions of the apparatus' ability to solve problems are lacking. These results indicate that it is necessary to improve the performance of the apparatus. There are several obstacles in the field including, the lack of funds, infrastructure, the vast area of Nabire Regency, the low level of public awareness regarding disasters and the COVID-19 pandemic. Suggestions that can be conveyed; firstly improving the quality of education for the apparatus, job rotation, fingerprint procurement, as well as online-based employee performance monitoring, providing online-based disaster reporting service applications; second, the application for additional facilities and infrastructure for the field sector (emergency response and logistics); The third is implementing a program of continuous apparatus development accompanied by monitoring and evaluation of the program.

Keywords: Performance, Apparatus, BPBD, Pandemic COVID-19

Abstrak

Dalam Penyusunan Laporan Akhir, penulis mengambil judul “**Kinerja Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Di Tengah Pandemi COVID-19**”. Kinerja Aparatur BPBD Kabupaten Nabire dinilai mengalami penurunan. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi bagaimana kinerja aparatur BPBD, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi dan menangani kendala. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan kinerja di BPBD Kabupaten Nabire, berdasarkan konsep 5 aspek penilaian kinerja aparatur yang meliputi kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan, dan komunikasi. Masing-masing memiliki nilai cukup baik. Adapun untuk aspek kemampuan, pada dimensi kemampuan aparatur dalam memenuhi target pekerjaan cukup baik, namun pada dimensi kemampuan aparatur dalam memecahkan masalah kurang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perlu dilakukan peningkatan kinerja aparatur. terdapat beberapa hambatan di lapangan diantaranya, minimnya dana, sarana prasarana, luasnya wilayah kabupaten nabire, rendahnya kepedulian masyarakat terkait bencana dan pandemi COVID-19. Saran yang dapat disampaikan; pertama meningkatkan kualitas pendidikan aparatur, rotasi jabatan, pengadaan *fingerprint*, serta pengawasan kinerja pegawai berbasis *online*, penyediaan aplikasi layanan pelaporan bencana berbasis *online*; kedua, pengajuan penambahan sarana dan prasarana bagi bidang lapangan (tanggap darurat dan logistik); ketiga melaksanakan program pembinaan aparatur secara berkesinambungan disertai monitoring dan evaluasi program.

Kata Kunci : Kinerja, Aparatur, BPBD, Pandemi COVID-19

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona virus Disease (COVID-19) merupakan suatu wabah virus penyakit yang sangat berbahaya yang pertama kali muncul di Negara China khususnya kota Wuhan pada penghujung tahun 2019. WHO telah menyatakan bahwa COVID-19 sebagai sebuah pandemi global yang dapat menyebar dengan cepat sampai ketinggian dengan penyebaran ke berbagai negara di dunia. COVID 19 adalah pandemic yang ditangani secara global dan masing-masing negara mengambil kebijakan untuk menangani kejadian wabah yang sampai ke negaranya. (Susilo et al. 2020)

Negara Indonesia tidak luput dari penyebaran COVID-19, sehingga dikeluarkannya Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 67 Tahun 2020 tentang sistem kerja

pegawai aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bekerja dengan mengedepankan Protokol kesehatan (PROKES), untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah.

Pandemi COVID 19 berdampak pada kinerja aparatur pemerintahan, namun terkait hal tersebut aparatur tidak boleh menjadikan wabah ini sebagai alasan untuk tidak memberikan pelayanan public yang baik kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa, masyarakat mempunyai hak untuk tetap mendapatkan pemenuhan pelayanan publik yang baik di tengah pandemi COVID-19.

Pemerintah Indonesia membentuk suatu badan pengelola dan tugas terkait kebencanaan yakni, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan salah satu lembaga Non-departemen sebagai instansi ditingkat pusat. Sesuai dengan asas desentralisasi dan tugas perbantuan di mana Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki fungsi dan tugas membantu dalam pelaksanaan penanggulangan bencana tingkat Provinsi/Kota daerah agar setiap daerah dapat memiliki perencanaan dalam penanggulangan bencana yang bertindak secara cepat, tepat, efisien, dan efektif dalam pemberian pelayanan sebagai pelindung masyarakat dan perantara pemerintah dalam hal penanggulangan bencana daerah.

Aparatur BPBD sejak awal pandemi sampai saat ini tidak menerapkan sistem WFH, hal ini di buktikan dari salah satu BPBD yang ada di kota solo yang tidak menerapkan sistem WFH. Karena aparatur BPBD harus bekerja secara action. (<https://kumparan.com> 2020)

Kinerja aparatur BPBD Kabupaten Nabire, menjadi sorotan tajam dalam pelaksanaan pemerintahan. Terkait kesigapan secara profesional di tengah pandemi COVID-19, dalam memberikan pelayanan terkait bencana dan perlindungan kepada masyarakat. BPBD berwenang menjalankan otonomi daerah, melalui Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 11 menyebutkan. Kewajiban pemerintah daerah adalah menjamin ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tugas BPBD sebagai, badan yang mengurus penanggulangan bencana di tengah pandemi COVID-19.

Kabupaten Nabire saat ini sedang menghadapi bencana non-alam seperti COVID-19, berdasarkan dari data kita bisa melihat adanya peningkatan kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Nabire. Akibat masih tingginya penyebaran COVID-19 ditengah kehidupan masyarakat dengan angka 100 orang yang terjangkit dan yang meninggal mencapai angka 2 orang. Perilaku masyarakat yang

mengabaikan PROKES dan menganggap COVID-19 ini bukanlah penyakit yang membahayakan. (<https://jubi.co.id> 2020)

Bupati Kabupaten Nabire kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Nabire. Pasal 6 menyebutkan penekanan kepada BPBD untuk memberikan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat. Fakta di lapangan menunjukkan kurang optimalnya kinerja aparatur BPBD kabupaten Nabire dalam bertindak. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Nabire menyayangkan lambatnya pembentukan posko penanggulangan COVID-19 di setiap kelurahan dan kampung, padahal DPRD sudah mengingatkan sejak awal pandemi COVID-19, Akibatnya Masyarakat keluhkan kinerja aparatur BPBD dalam mencegah dan menekan peningkatan jumlah pasien yang terus melonjak di kabupaten Nabire. (<https://jubi.co.id> 2020c)

Kinerja aparatur BPBD kabupaten Nabire mendapat perhatian dari berbagai kalangan masyarakat, sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan bagaimana kinerja aparatur BPBD Kabupaten Nabire di tengah pandemi COVID-19. Penelitian terdahulu mengatakan bahwa dampak dari COVID-19 berpengaruh kepada kualitas kinerja dan produktivitas pegawai yang cenderung menurun pada saat pandemi (Ince 2020).

1.2 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan terkait dengan kinerja aparatur BPBD Kabupaten Nabire Provinsi Papua di tengah pandemi COVID-19, diantaranya, aparatur BPBD dalam bekerja di tengah pandemi COVID-19 tidak menerapkan sistem WFH, karena aparatur BPBD harus bekerja secara action dan menjadi garda terdepan sebagai tameng penanganan COVID-19. Kurang optimalnya kinerja aparatur BPBD Kabupaten Nabire dalam bertindak. Fakta di lapangan menunjukkan kurang optimalnya kinerja aparatur BPBD Kabupaten Nabire dalam bertindak. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Nabire menyayangkan lambatnya pembentukan posko penanggulangan COVID-19 di setiap kelurahan dan kampung, padahal DPRD sudah mengingatkan sejak awal pandemi COVID-19, Akibatnya Masyarakat keluhkan kinerja aparatur BPBD dalam mencegah dan menekan peningkatan jumlah pasien yang terus melonjak di Kabupaten Nabire.

I.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian mengenai indentifikasi bagaimana kinerja aparatur di tengah pandemi COVID-19. Penelitian Hamdani yang berjudul *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Menanggulangi Bencana Banjir Di Desa Dawuan kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang*, (Hamdani, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPBD Kabupaten Karawang menanggulangi bencana banjir belum berjalan dengan baik, masih terdapat permasalahan yang terjadi, dari segi sarana dan prasarana yaitu peralatan yang ada belum memadai, aparatur yang ada masih belum mencukupi, aparatur kurang profesional dalam bekerja, aparatur belum memberikan kinerja yang cepat, bantuan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Karawang masih terkendala dana. Penelitian Wuri yang berjudul *Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Publik Di Era Covid-19*, disimpulkan kinerja pegawai yang di lihat dari indikator sikap atau perilaku dalam pelayanan publik di kantor Kecamatan Langowan Barat dapat dikatakan keramahan dan cara memperlakukan publik atau masyarakat berjalan kurang maskimal. Artinya setiap sikap kerja-kerja pelayanan publik oleh pegawai kantor Kecamatan Langowan Barat terkendala karena faktor penyesuaian dengan protokol covid-19. Pada aspek sistem pelayanan publik saat pandemi covid-19 pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai Kecamatan Langowan Barat mengalami perubahan yang dilihat pada jumlah pegawai yang berkurang, pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelayanan masyarakat. Penelitian dengan judul *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Wilayah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung (Suatu Studi Dalam Penanggulangan Bencana Banjir)*, (Candra, 2013). Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan, produktivitas kinerja BPBD Kabupaten Bandung sudah cukup baik dengan adanya bantuan kepada korban banjir dan kejelasan waktu penanggulangan bencana banjir. Kualitas layanan kinerja BPBD Kabupaten Bandung cukup baik dilihat dari adanya fasilitas teknologi komunikasi dan informasi serta adanya diklat kepada aparatur dan masyarakat. Responsivitas kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Baleendah cukup baik, hal tersebut di lihat dari adanya peringatan dini dan tanggap darurat serta pemenuhan akan kebutuhan masyarakat yang terkena banjir. Responsibilitas BPBD Kabupaten Bandung berjalan cukup baik karena sudah sesuai dengan pra SOP dan peraturan yang ada. Akuntabilitas Kinerja BPBD Kabupaten Bandung sudah baik dilihat dari tercapainya sasaran dari kegiatan atau program BPBD Kabupaten Bandung. Dengan demikian kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir dinilai sudah cukup baik. Penelitian dengan judul *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Turki*, (Ince, 2020) Penelitian ini berupaya memahami dampak pandemi terhadap persepsi dan kinerja pegawai selama lockdown di

Turki. Studi ini juga dilakukan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik antara persepsi sebelum dan selama pandemi pada cakupan fitur demografis. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kinerja karyawan cenderung menurun selama masa pandemi, dan produktivitas karyawan berhubungan langsung dengan kesejahteraan karyawan pada periode ini. Sementara itu, pekerjaan rumah berkorelasi negatif dengan kinerja selama lockdown akibat kecemasan Covid-19 dan kondisi rumah seperti ergonomis, kumpul kebo, dan kesiapsiagaan. Sementara pegawai menemukan kinerja mereka rendah selama pandemi, serta mengalami penurunan produktivitas. Penelitian dengan judul *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi korban bencana banjir di Kampung Lambing Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat*, (Idris, 2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai BPBD memiliki kreativitas saat menanggulangi korban bencana banjir di kampung yang terkena bencana banjir. Kerjasama BPBD dilakukan dimana saja, di lokasi bencana. Pegawai BPBD memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam penanggulangan korban banjir, yang dilakukan di tempat bencana penanggulangan korban masyarakat. kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran dalam mengerjakan penanggulangan korban bencana banjir anggota BPBD yang dilakukan tidak menimbulkan korban bencana banjir meninggal dunia. BPBD bertanggung jawab dalam menanggulangi korban bencana banjir, untuk lebih dekat dengan masyarakat maka BPBD telah membentuk posko penanggulangan bencana ditiap kecamatan dan telah berjalan setelah dua tahun terbentuknya BPBD. Posko di bentuk agar masyarakat yang terkena bencana dapat segera tertolong.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana kontes penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire di tengah pandemi COVID-19, dengan menggunakan dimensi kinerja dari Teori Teori Indikator kinerja menurut Mitchel dan Larson dalam (Imron 2018:25) yaitu Kualitas hasil kerja (*quality of work*), Ketepatan waktu (*promptness*), Inisiatif (*Initiative*), Kemampuan (*capability*), Komunikasi (*communication*).

1.5 Tujuan

Untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana kinerja, penghambat dan upaya dalam mengatasi hambatan dari kinerja aparatur badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua di tengah pandemi COVID-19.

II. METODE

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis tentang apa yang terjadi di lapangan. Dalam lokasi penelitian tentu saja terdapat data yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian. Maka kegiatan terpenting dalam penelitian adalah pengumpulan data.

Maka penulis berkesimpulan bahwa pengumpulan data merupakan suatu hal yang wajib dilakukan dalam penelitian yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang sistematis guna memperoleh data yang sesuai dengan apa yang dibahas pada rumusan masalah. Dari penjelasan di atas maka penulis dalam proses penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis data di lapangan. Menurut Miles *and* Huberman (Yusuf 2019:407–409) menyatakan bahwa “dalam menganalisis data dengan menggunakan 3 tahapan yakni dengan, reduksi data, data display, kesimpulan/verifikasi”.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kinerja Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua di Tengah Pandemi COVID-19

3.1.1 Kualitas Hasil Kerja (*Quality Of Work*)

Dalam dimensi kuanlitas kerja yang ingin diamati oleh penulis yang dihasilkan oleh pegawai atau dapat disebut juga dengan hasil kinerja pegawai BPBD dalam bekerja di tengah Pandemi COVID-19. Kabupaten Nabire merupakan salah satu kecamatan terpadat dan dapat dikatakan bahwa Kabupaten Nabire adalah Kabupaten yang rawan penyebaran COVID-19. Hasil yang di lihat di lapangan aparat BPBD tetap menjalankan tugasnya dengan baik, dengan tetap aktif bekerja dan menjalankan tugasnya dengan baik, dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data hasil wawancara dari perbandingan wawancara aparat BPBD dengan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Viktor Fun, S.Sos, M,Si sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nabire, beliau menyatakan bahwa :

Kinerja aparat sudah cukup baik dalam melakukan pekerjaan di tengah pandemi COVID-19, ada beberapa kendala dan hambatan salah satunya yang di hadapi yakni menurunnya kinerja aparat dalam bekerja di tengah pandemi COVID-19 yang di akibatkan karena pegawai merasa cemas apabila tertular oleh COVID-19 yang kasusnya terus meningkat di Kabupaten Nabire. Hal ini mempengaruhi kedisiplinan waktu kerja pegawai dalam bekerja di tengah pandemi COVID-19. Saya rasa perlu

adanya penyesuaian kerja yang mengedepankan protokol kesehatan serta peningkatan kualitas SDM kami.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Paulus selaku masyarakat kabupaten Nabire, beliau mengatakan :

Hasil kinerja aparat BPBD yang di tunjukan kepada kami selaku masyarakat boleh di katakan cukup baik, di mana aparat BPBD sudah bekerja dengan tetap aktif memberikan pelayanan kepada kami meski kabupaten Nabire saat ini sedang di landa oleh COVID-19, namun menurut saya respon aparat dalam menangani bencana masih kurang, contohnya pembangunan posko satgas COVID-19 yang terlambat.

Maka dapat diketahui bahwa hasil kerja aparat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua saat dapat di katakan sudah cukup baik, tetapi belum maksimal karena adanya hambatan dan kendala seperti, menurunnya kinerja aparat dalam bekerja di tengah pandemi COVID-19 yang di akibatkan karena pegawai merasa cemas apabila tertular oleh COVID-19. Kemudian tanggapan dari masa adanya keluhan masyarakat terkait pembangunan posko satgas COVID-19 yang terlambat.

3.1.2 Ketepatan Waktu (*Promptness*)

Kualitas pekerjaan memiliki tiga dimensi antara lain yaitu konsep ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas yaitu kecepatan dan ketepatan waktu aparat dalam mentepati waktu, spontanitas aparat dalam menangani permasalahan dalam melayani masyarakat, dan daya tanggap aparat dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

Kecepatan dan ketepatan waktu aparat BPBD di tengah pandemi COVID-19 di lapangan, aparat sebagian besar sudah mentaati waktu dengan cukup baik, secara disiplin tetap aktif masuk ke kantor dengan sesuai waktu yang di tetapkan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Theodorus Irianto, S.Pd sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Nabire, menyatakan bahwa :

Kecepatan dan ketepatan waktu anggota sudah bisa di katakan cukup baik dengan mengikuti setiap kehadiran dalam kegiatan kantor dan ketepatan waktu kerja, namun memang ada juga beberapa oknum pegawai yang memang hanya menitip absen dan sengaja tidak datang tepat waktu dalam masuk kerja di kantor dengan berbagai alasan. Untuk tiap pelaksanaan tugas kita, untuk Kabupaten Nabire ini wilayahnya memang luas, baik darat maupun sungai memang menjadi kendala kami dalam melaksanakan setiap pelaksanaan tugas, Kemudian karena adanya pandemi COVID-19 menjadi salah satu dari kendala kami dalam bekerja, untuk keterbatasan sarana dan prasarana juga mempengaruhi kami dari

ketepatan dan kecepatan aparat, dalam hal ini saya rasa kami sudah cukup dan kami memang selalu berupaya yang terbaik dalam melaksanakan tugas kami dengan memberikan pelayanan di tengah pandemi COVID-19 ini.

Hasil dari kecepatan dan ketepatan waktu aparatur BPBD, saat ini sudah bisa di katakan cukup baik, namun belum maksimal karena adanya hambatan dalam pelaksanaan tugas. luasnya wilayah Kabupaten Nabire serta Keterbatasan sarana dan prasarana, kemudian COVID-19 menjadi salah satu hambatan aparat BPBD dalam pelaksanaan giat tugas di tengah pandemi COVID-19.

Spontanitas aparatur BPBD di tengah pandemi COVID-19. Terpengaruh oleh sarana prasarana penunjang di lapangan memang kurang memadai, seperti yang terparkir pada lingkungan kantor terdapat beberapa kendaraan rescue yang rusak.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Manase Yoteni S.H. M.Si sebagai Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik BPBD Nabire, menyatakan bahwa :

Kinerja aparatur dalam hal spontanitas saya rasa anggota kami sudah bekerja dengan cukup baik, walaupun masih terdapat beberapa kendala yang tidak bisa dipungkiri juga dikarenakan kurangnya dana, banyaknya sarana prasarana yang rusak, dan luas wilayah juga menjadi hambatan, serta dengan adanya wabah COVID-19. Namun kendati begitu ketika kami mendapatkan laporan terkait bencana, kami langsung menanggapi dengan cara melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan beberapa instansi yang terkait karena dalam pelaksanaan tugas BPBD harus melibatkan beberapa instansi dan pihak lain dalam membantu penanganan bencana yang ada di Kabupaten Nabire dikarenakan jumlah anggota kami yang terbatas.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nia sebagai masyarakat Kabupaten Nabire pada hari Jumat, 29 Januari 2021 Pukul 15.30 WIT bertempat di Nabire Barat, mengatakan :

Spontanitas aparatur BPBD saat ini saya lihat sudah cukup baik. Saya selaku masyarakat Kabupaten Nabire merasakan penanganan terkait banjir maupun COVID-19 di tengah pandemi ini tetap dilaksanakan dan kami rasakan, dengan adanya sosialisasi penanganan COVID-19 dan bantuan sosial yang di berikan kepada kami. Hanya saja perlu adanya peningkatan waktu penanganannya agar tidak terlambat dalam menangani dan memberikan pelayanan kepada kami, juga dikarenakan jarak kantor yang jauh dengan daerah rawan bencana.

Spontanitas aparatur BPBD Kabupaten Nabire sudah cukup baik, namun belum optimal karena ada beberapa masalah terkait kurangnya dana, luasnya wilayah Kabupaten Nabire, keterbatasan sarana dan prasarana, dan pengaruh

pandemi COVID-19, serta masih ada keluhan masyarakat tentang perlunya peningkatan waktu aparat BPBD dalam penanganan dan pemberian pelayanan harus di tingkatkan.

Daya tanggap Aparatur BPBD Kabupaten Nabire masih terkendala dengan jarak kantor dengan jarak antar kota dan kecamatan yang cukup jauh, serta medan lapangan yang cukup berat seperti ada beberapa daerah yang sulit dan tidak bisa di jangkau dengan perjalanan darat, sehingga mempengaruhi daya tanggap dari aparat BPBD Kabupaten Nabire.

Jarak antar kecamatan ke pusat kecamatan terbilang cukup jauh pada beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Nabire, kemudian tidak semua kondisi jalan pada daerah kabupaten Nabire memiliki kondisi yang baik, dan ada beberapa daerah yang hanya bisa di jangkau dengan transportasi udara dan sungai, sehingga hal ini berpengaruh pada proses kecepatan, ketepatan, serta daya tanggap aparat dalam setiap penanganan bencana yang ada di setiap daerah kabupaten Nabire. Hasil wawancara penulis dengan, Bapak Manase Yoteni S.H. M.Si sebagai Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik BPBD Kabupaten Nabire, menyatakan bahwa :

Daya tanggap aparat kami sudah cukup baik, Namun dalam menangani setiap pengaduan dari masyarakat terkait daerah yang terjadi memang mengalami kesulitan. Karena memang jarak kantor antar kota dan kecamatan yang memang jauh dari pusat kota dengan jarak 14 Km dari pusat kota dan begitu pun dengan daerah-daerah lainnya. Saat ini kami masih belum memiliki *call center* untuk pengaduan masyarakat, dan serta sarana dan prasarana kami yang memang kurang memadai dan ada yang rusak, sehingga kemudian hal ini mempengaruhi proses daya tanggap dari aparat kami. Namun untuk kedepannya kami merencanakan untuk menyediakan *call center*, sehingga ketika terdapat permasalahan, aparat bisa langsung menanggapi dan menangani laporan terkait masalah tersebut.

Daya tanggap aparat sudah cukup baik, namun terdapat terkendala kendala seperti, luasnya wilayah antar kecamatan dan kabupaten kota, serta jarak kantor yang jauh dari kota Kabupaten dengan jarak 14 km, sarana dan prasarana pun belum memadai dan banyak yang rusak, kemudian belum tersedianya *call center* untuk pengaduan masyarakat. Hal ini sangat mempengaruhi proses dari daya tanggap aparat, sehingga kedepannya BPBD akan menyediakan *call center* untuk mempermudah dalam menanggapi permasalahan dan pemberian layanan kepada masyarakat.

4.1.3 Inisiatif (*Initiative*)

Inisiatif menjadi hal yang sangat penting untuk memunculkan hal-hal baru atau ide yang belum pernah muncul sebelumnya. Sehingga dalam konteks

ini, konsep inisiatif yaitu tindakan apa yang dilakukan dalam pemecahan permasalahan dan pemberian ide/gagasan oleh aparat.

Tindakan aparat BPBD di tengah pandemi COVID-19, penulis melihat bahwa aparat di lapangan dalam pelaksanaan tugas, sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dengan tetap berupaya melakukan penanganan bencana pandemi COVID-19.

Tabel 4.7

Penanganan Bencana Kabupaten Nabire 2020

No.	TGL/Waktu Kejadian	Jenis Bencana	Penanganan
1	2	3	4
1	17 Maret 2020	COVID-19	- Himbauan Dini dan Sosialisasi Kepada Masyarakat Terkait Pencegahan dan Penanganan COVID-19
2	21 Maret 2020	COVID-19	- Screening Seluruh Penumpang KM Labobar
3	22 Maret 2020	COVID-19	- Screening dan Sosialisasi di Bandara Nabire
4	12 September 2020	Gempa Bumi 3,4	- Pengumpulan Informasi dan Monitoring - Himbauan Kepada Masyarakat
5	26 September 2020	Kebakaran	- Personil Turun Ke Lokasi Dengan Melakukan Evakuasi Warga - Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana - Pembersihan Puing-Puing Bekas Kebakaran
6	2 Oktober 2020	Kebakaran	- Personil Turun Ke Lokasi dengan Melakukan Evakuasi Warga - Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana - Pembersihan Puing-Puing Bekas Kebakaran
7	6 Oktober 2020	Gempa Bumi 3,3	- Pengumpulan Informasi dan Monitoring - Himbauan Kepada Masyarakat
8	12 Oktober 2020	Gempa Bumi 3,8	- Pengumpulan Informasi dan Monitoring - Himbauan Kepada Masyarakat
9	2 November 2020	Banjir Bandang	- Tim BPBD Beserta Kepala Badan Ikut Turun dan Meninjau Lokasi Banjir Bandang dan Kapolsek Kota Nabire - Penyelamatan, Menyelamatkan Manusia dan Harta Benda
10	9 November 2020	Gempa bumi 4,3	- Pengumpulan Informasi dan Monitoring

			- Himbauan kepada Masyarakat
11	11 November 2020	Gempa bumi 3,5	- Pengumpulan Informasi dan monitoring - Himbauan kepada Masyarakat

Sumber : Catatan LOGBOOK Bencana PUSDALOPS BPBD Kabupaten Nabire

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa, meski Kabupaten Nabire sedang dilanda pandemi COVID-19, aparat BPBD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya selama pandemi COVID-19 dengan tetap memberikan kinerja dan pelayanan meski dengan ketebatasan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa aparat BPBD sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya di tengah pandemi COVID-19 dengan tetap aktif memberikan pelayanan dan kinerja di tengah pandemi COVID-19.

Hasil wawancara penulis dengan, Theodorus Irianto, S.Pd sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Nabire, beliau menyatakan bahwa :

Tindakan dari aparat BPBD di tengah pandemi COVID-19 ini sudah cukup baik, dimana aparat kami tetap melaksanakan tugas dan salah satunya upaya yang kami lakukan di antaranya dengan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19, dengan upaya sosialisasi ke masyarakat, sekolah-sekolah dan juga beberapa OPD terkait penanganan COVID-19 serta upaya lain yang kami lakukan adalah pembagian masker dan penyemprotan disinfektan ke beberapa tempat. sementara itu upaya dalam pemberian pelayanan publik memang kami belum memiliki inovasi namun kami tetap memegang teguh protokol kesehatan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Wahyu sebagai masyarakat Kabupaten Nabire pada hari Kamis, 28 Januari 2021 Pukul 16.00 WIT bertempat di Siriwini, mengatakan :

Tindakan dari aparat BPBD di tengah pandemi ini sudah cukup baik dan kami memang merasakan sendiri pelayanan yang diberikan oleh BPBD dengan melakukan sosialisasi serta upaya-upaya dalam penanganan bencana serta penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Nabire. Namun memang pelaksanaannya kurang maksimal tetapi kami selaku masyarakat mengapresiasi kerja aparat BPBD yang tetap aktif menjalankan tugasnya.

Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa tindakan dari aparat BPBD di tengah pandemi COVID-19, sudah cukup baik, tetapi pelaksanaannya kurang maksimal, namun masyarakat sudah cukup mengapresiasi kinerja yang telah di berikan oleh aparat BPBD di tengah Pandemi COVID-19 dengan tetap melakukan upaya-upaya penanganan bencana dan penanggulangan COVID-19.

Inisiatif aparat dalam hal pemberian ide/gagasan, terlihat bahwa, bapak Kepala pelaksana BPBD selalu bersikap terbuka dalam menerima usul dan saran

aparatur dalam memberikan ide/gagasan. Kemudian para aparatur sendiri dalam memberikan ide/gagasan, senantiasa aktif dalam memberikan ide /gagasan, namun hanya saja terkadang aparatur kurang bisa memahami tupoksi dan situasi, sehingga terkadang ide/gagasan kurang bisa menjadi masukan dalam pelaksanaan tugas, kendati begitu penulis menilai dalam aspek inisiatif dalam pemberian ide/gagasan sudah bisa dikatakan cukup baik dilihat hasil observasi penulis di lapangan.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Viktor Fun, S.Sos. M,Si sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire, beliau menyatakan bahwa :

Selaku pimpinan BPBD, saya selalu mengumpulkan mereka dan terbuka dalam menerima usul saran serta apresiasi dan gagasan mereka. Dalam hal ini saya menilai pegawai aktif dalam memberikan saran, tetapi terkadang memang pegawai tidak mengerti permasalahan dan dampak dari usulan mereka sehingga cenderung menguntungkan satu pihak saja. Oleh karena itu saya selaku pimpinan harus lebih cermat dan selektif dalam menampung aspirasi yang diberikan oleh aparatur BPBD. Kemudian inisiatif anggota saya rasa perlu ditingkatkan contohnya dalam pelaksanaan tugas. Hal ini juga dapat dimaklumi karena memang pegawai takut terpapar oleh COVID-19, tetapi saya selaku pimpinan akan berupaya meningkatkan inisiatif pegawai.

Hasil wawancara penulis dengan, Bapak Manase Yoteni S.H. M.Si sebagai Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik BPBD Nabire Provinsi Papua, menyatakan bahwa :

Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kami memang sangat menghargai segala masukan dan aspirasi dari para aparatur BPBD, saya juga merasa senang dengan adanya keterbukaan dari bapak kepala dengan menerima segala masukan dan aspirasi pegawai. namun tentu menurut saya lebih baik kami melaksanakan langsung apa saja perintah dari bapak kepala BPBD karena apabila kami salah mengambil inisiatif sendiri tanpa adanya koordinasi dari atasan pastinya kami juga akan mendapatkan dampak kepada kami sendiri, oleh karenanya kami hanya menunggu perintah dalam melaksanakan tugas agar apa yang kami kerjakan dapat berjalan dengan baik.

Hasil wawancara yang penulis dapatkan maka Pemberian ide/gagasan dapat diketahui bahwa yang dilakukan oleh aparatur sudah cukup baik, dimana pegawai masih aktif dalam Pemberian ide/gagasan, namun pegawai terkadang masih tidak mengerti permasalahan dan dampak dari usulan mereka sehingga cenderung menguntungkan satu pihak saja. Kemudian inisiatif aparatur perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas, hal ini di akibatkan karena pegawai takut terpapar oleh COVID-19.

3.1.4 Kemampuan (*Capability*)

Kemampuan atau dapat diartikan sebagai kecakapan atau potensi seorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan berbagai tugas yang diberikan dalam suatu pekerjaan. Kemudian dalam konteks ini, konsep kemampuan yaitu Kemampuan aparatur dalam memenuhi target pekerjaan dan Kemampuan aparatur dalam memecahkan masalah di tengah pandemi COVID-19.

Kemampuan dalam memenuhi target pekerjaan aparatur BPBD di tengah pandemi COVID-19, berdasarkan pengamatan di lapangan penulis melihat bahwa aparatur tetap aktif dan berupaya dalam penanganan bencana dan pandemi COVID-19. Aparatur BPBD tetap melaksanakan tugas dan fungsinya selama pandemi COVID-19 dengan tetap memberikan kinerja dan pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa aparatur BPBD sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik yaitu dengan tetap memberikan pelayanan di tengah pandemi COVID-19.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Viktor Fun, S.Sos. M,Si sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nabire, beliau menyatakan bahwa :

Saat ini memang kemampuan aparatur dalam memenuhi target pekerjaan dapat dikatakan cukup baik, karena keterbatasannya sarana dan prasarana serta dampak dari COVID-19 ini mengganggu pelaksanaan tugas kami. Kemudian kurangnya dukungan dari aparatur yang berkompeten tetapi kami berupaya menggandeng pihak instansi lain untuk menutupi kelemahan kami.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Alexander Pekey, S.STP, M,Si sebagai Sekretaris BPBD Kabupaten Nabire, beliau menyatakan bahwa :

Terkait target pekerjaan saya rasa masih cukup baik, mengingat masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tidak lengkap dan rusak sehingga mempengaruhi kemampuan kami dalam memberikan pelayanan di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga mengakui bahwa kualitas aparatur kami belum semua berkompeten dalam penanggulangan bencana dan jangkauan wilayah yang luas, minimnya dana serta jumlah anggota kami yang masih sangat terbatas. Kendati itu, kami selalu siap melaksanakan tugas kami kapan pun terjadi bencana.

Maka dapat diketahui bahwa kemampuan aparatur dalam memenuhi target dapat di katakan cukup baik namun kurang maksimal, dikarenakan terbatasnya jumlah anggota, serta sarana dan prasarana yang tidak lengkap dan rusak sehingga mempengaruhi kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan di tengah pandemi COVID-19, akibatnya dalam penanggulangan bencana BPBD harus koordinasi dengan instansi lain untuk menangani bencana, agar dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal.

Kemampuan dalam memecahkan masalah aparatur BPBD di tengah pandemi COVID-19. Penulis dalam pengamatan lapangan melihat aparatur kurang maksimal dalam tindakan kinerja lapangan, hal ini dikarenakan minimnya

sarana prasarana penunjang pada kegiatan penanganan dan pencegahan pandemi COVID-19 data dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 4.9
Kebutuhan Sarana Prasarana Penanganan dan Pencegahan Pandemi COVID-19 BPBD Kabupaten Nabire 2020

NO	NAMA PERALATAN	JUMLAH KEBUTUHAN
1	Alat Pelindung Diri (APD)	50 Unit
2	Kantong Jenazah	50 Unit
3	Alat TCM/PCR	96 Running
4	Mobil Ambulance	1 Unit
5	Mobil Rescue	1 Unit
6	Motor Trail Rescue	4 Unit
7	Speedboat/ Perahu Karet	1 Unit

Sumber : BPBD Kabupaten Nabire Provinsi Papua 2020

Dapat di ketahui bahwa, minimnya sarana prasana penunjang sehingga di perlukan sarana prasarana tambahan, di mana hal ini tentunya sangat mempengaruhi pada proses kinerja aparatur, sehingga penulis menilai bahwa mininya sarana prasarana mempengaruhi kemampuan aparatur BPBD dalam memecahkan masalah, sehingga dalam pelaksanaannya kurang maksimal.

Hasil wawancara penulis dengan, Theodorus Irianto, S.Pd sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Nabire, beliau menyatakan bahwa :

Kemampuan aparat dalam memecahkan persoalan serta masalah di tengah pandemi COVID-19 ini saya rasa masih kurang karena masalah yang dihadapi merupakan bentuk bencana yang baru yakni wabah COVID-19, sehingga aparatur masih perlu beradaptasi dalam penyelesaian masalah. Hal ini juga terlihat dari kualitas SDM kami yang masih kurang yang kebanyakan sebagian besar merupakan lulusan SLTA serta kami memerlukan banyaknya sarana prasarana penunjang dalam kegiatan penanganan pandemi ini.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Ikram sebagai masyarakat Kabupaten Nabire, mengatakan bahwa :

Kami merasa memang kemampuan dari aparat BPBD dalam penanganan COVID-19 masih kurang maksimal karena memang saat ini pandemi COVID-19 di Kabupaten Nabire terus meningkat dan membuat kami terus khawatir, tetapi begitu kami juga menghargai beberapa upaya yang telah dilakukan oleh aparat BPBD yang masih terus berusaha untuk menangani pandemi COVID-19 yang terus melanda kabupaten Nabire

kemampuan aparat BPBD dalam memecahkan persoalan dan permasalahan di tengah pandemi masih kurang dan dalam penanganannya kurang maksimal dikarenakan bencana COVID-19 merupakan bentuk bencana baru dan sulit di kendalikan, kemudian hal ini juga di dukung dengan kemudian kualitas SDM dari BPBD yang masih kurang.

3.1.5 Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi yang baik akan memberikan efek dan dampak yang baik pada kinerja aparat dalam sebuah organisasi tersebut. kemudian dalam konteks ini, konsep komunikasi yaitu komunikasi intern dan ekstern, serta relasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas di tengah pandemi COVID-19.

Komunikasi intern pada BPBD sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, hal ini terlihat pada sikap dari bapak Kepala pelaksana BPBD selalu bersikap terbuka dalam menerima usul dan saran aparat dalam memberikan ide/gagasan. Kemudian para aparat sendiri dalam memberikan ide/gagasan, senantiasa aktif dalam memberikan ide /gagasan. sedangkan pada aspek komunikasi ekstern, sudah berlajam cukup baik, dimana koordinasi, komunikasi, dan relasi sudah berjalan dan tetap terlajin dengan dengan cukup baik.

Hasil wawancara penulis dengan bapak Viktor Fun, S.Sos. M,Si sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nabire pada hari kamis, tanggal 28 Januari 2021 pukul 10:00 WIT bertempat di ruang kerja kepala pelaksana BPBD Kabupaten Nabire, beliau menyatakan bahwa :

Saya selaku pimpinan selalu menekankan dan mengharapkan untuk pegawai agar selalu terbuka dengan masukan ataupun usul saran serta informasi yang perlu disampaikan. Kemudian sama halnya dengan tata cara koordinasi komunikasi antar pegawai dengan pihak lain yang dilakukan dengan cara yang baik dan sopan agar menghasilkan koordinasi yang baik dan cara yang baik. seperti dengan pelaksanaan penanggulangan bencana COVID-19 di mana memerlukan koordinasi komunikasi yang baik dengan pihak aparat BPBD dengan satgas COVID-19 serta masyarakat agar percepatan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Nabire lebih cepat tertangani dengan baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan, Theodorus Irianto, S.Pd sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD

Kabupaten Nabire Provinsi Papua tanggal 28 Januari 2021 pukul 11:30 WIT bertempat di ruangan kerja kerja Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Nabire, beliau menyatakan bahwa :

Menurut saya sejauh ini dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana yang dilakukan oleh aparaturnya tentu perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang baik secara eksternal maupun internal, dengan komunikasi internal yang baik maka akan mempengaruhi hasil kinerja yang baik pula. dan sejauh ini komunikasi intern di lingkungan kantor tetap berjalan dengan baik dan juga koordinasi dalam komunikasi eksternal sejauh ini yang saya sudah berjalan dengan baik.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Ita sebagai masyarakat Kabupaten Nabire pada hari Jumat 29 Januari 2021 Pukul 16:00 WIT bertempat di Wanggar, mengatakan bahwa :

Kami melihat jalinan koordinasi dan komunikasi yang terjadi antara aparaturnya BPBD dengan pihak lain terlihat berjalan dengan baik dimana kami melihat dalam penanganan bencana, BPBD dengan pihak lain seperti TNI-POLRI, dan tenaga kesehatan, terlihat bekerja sama dengan baik dalam penanganan virus COVID-19 di kabupaten Nabire.

Komunikasi eksternal maupun internal sudah berjalan baik, hal ini juga di dukung dengan pengakuan masyarakat yang melihat jalinan koordinasi dan komunikasi antara pihak BPBD dengan TNI-POLRI dan tenaga kesehatan yang bersama-sama terlibat dalam gerakan penanganan virus COVID-19 di Kabupaten Nabire.

Relasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas aparaturnya BPBD di tengah pandemi COVID-19, sudah berjalan dengan baik, hal ini di dukung dengan komunikasi baik internal dan eksternal tetap berjalan dengan cukup baik.

Hasil wawancara penulis dengan, Bapak Manase Yoteni S.H. M.Si sebagai Kepala Bidang Tanggap Darurat dan Logistik BPBD Nabire, menyatakan bahwa :

BPBD Kabupaten Nabire dalam menjalankan tugasnya telah melaksanakan penanggulangan bencana secara bersama dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana di Kabupaten Nabire. Kami bersama pihak lain melakukan relasi kerja sama seperti TNI, polisi, serta tenaga kesehatan guna menunjang keberhasilan dalam penanganan bencana dan COVID-19 di Kabupaten Nabire. Walaupun demikian memang koordinasi dan rapat tidak bisa secara rutin terlaksana dengan baik dikarenakan kesibukan dari pihak-pihak lain terkait.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Ira sebagai masyarakat Kabupaten Nabire, mengatakan bahwa :

Sejauh ini saya selaku masyarakat melihat hubungan kerja dari antar pihak BPBD maupun bentuk kerja sama dan relasi dengan pihak lain sejauh ini cukup baik. Hal ini di tunjukan dengan kegiatan mereka beberapa dekade lalu berupaya bersama-sama dengan pihak Kesehatan maupun TNI-POLRI melakukan kolaborasi jalinan kerja sama dalam giat penanganan COVID-19 seperti membagikan masker, sosialisasi, dan melakukan penyemprotan desinfektan di berbagai tempat.

Berdasarkan pada keterangan di atas, dapat diketahui bahwa relasi dan kerja sama dari BPBD sendiri sudah berjalan dengan baik, namun memang sebaiknya dilakukan pertemuan atau rapat rutin secara bersama oleh instansi terkait agar penanggulangan bencana dapat terwujudnya lebih cepat dan sesuai yang di harapkan.

3.2 Faktor Penghambat BPBD Kabupaten Nabire Provinsi Papua

3.2.1 Minimnya Dana

Berdasarkan dari keterangan kepala badan penanggulangan bencana dan data dari LAKIP mengenai dana memang untuk tahun 2020 mengalami kekurangan anggaran penunjang kegiatan lapangan, dimana memang anggaran pada tahun 2020 lebih kecil anggarannya di bandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya.

3.2.2 Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan dan Pandemi COVID-19

Lemahnya kesadaran akan lingkungan dari masyarakat memang menjadi faktor penghambat dalam pencegahan bencana alam maupun COVID-19. dikarenakan memang disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan dan budaya masyarakat lokal, menjadi salah satu parameter bagi kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Hal ini dapat dilihat juga dari tingginya angka COVID-19 yang masih terus meningkat di Kabupaten Nabire. Sampai saat ini jumlah total terpapar COVID-19 di Kabupaten Nabire sebanyak 429 dan yang meninggal sebanyak 14 orang dengan mencapai 6 titik daerah zona merah terpapar COVID-19.

3.2.3 Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Minimnya peralatan penunjang BPBD tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja aparatur dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas, terlebih aparatur pada bidang kebencanaan mengalami kendala fasilitas seperti alat pemadam kebakaran yang rusak serta kurangnya fasilitas untuk penanganan COVID-19. Seperti laporan tertulis pada laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang membutuhkan penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti penambahan APD dan kantong

jenazah kemudian penambahan lain seperti, 2 kendaraan roda empat (ambulance untuk evakuasi), 4 kendaraan roda dua (untuk akses pelacakan), dan alat TCM/PCR (kapasitas *running* 96 kali), serta 1-unit fasilitas transportasi laut.

3.2.4 Luasnya Wilayah Kabupaten Nabire dan Jaringan Komunikasi

Berdasarkan pada data BPS Kabupaten Nabire mempunyai luas daratan yang berkisar 12.075,00-kilometer persegi (km²) atau sekitar 3,72 persen (%) dari luas wilayah Provinsi Papua (322.476 km²) dan wilayah lautnya memiliki luas 914.056,96 hektar (ha) dengan garis pantai sepanjang 473 kilometer (km²). Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki letak kantor dengan berjarak sekitar 14 km² dari pusat kota, kemudian dengan jarak luas, menimbulkan ketidakseimbangan mengingat, jumlah pegawai dan minimnya sarana dan prasarana yang tersedia menyulitkan aparat BPBD, dalam setiap pelaksanaan tugas penanggulangan bencana daerah, serta mengalami kesulitan seperti jalan yang sulit di tempuh.

3.2.5 Kurangnya Kedisiplinan Aparatur BPBD dalam Bekerja

Sebagai imbas dari pandemi COVID-19 yang berpengaruh pada kedisiplinan dan produktivitas pegawai, dimana sebagian aparat dirundung rasa takut dalam bekerja baik di lapangan maupun bekerja di lingkungan kantor, hal ini terlihat dari beberapa aparat yang tidak hadir dengan berbagai alasan serta aparat yang hanya datang untuk mengabsen lalu pulang, terlihat dari observasi lapangan aparat pada siang hari yang aktif ke kantor hanya terlihat sedikit yang hadir dan aktif di kantor.

3.2.6 Daerah Kabupaten Nabire Merupakan Daerah Rawan Bencana dan Daerah Rawan Penyebaran COVID-19

Berdasarkan data hasil perolehan dari LAKIP BPBD, Kabupaten Nabire memiliki 9 potensi bencana yang di perkirakan dapat terjadi yakni bencana banjir, gempa bumi, tsunami, longsor, kebakaran, abrasi pantai, angin puting beliung, wabah penyakit, konflik sosial

Kabupaten Nabire saat ini sudah memiliki 6 titik zona merah COVID-19, dan jumlah positif COVID-19 sebanyak 429 orang, dengan 14 yang tercatat telah meninggal dunia. Tingginya angka kasus COVID-19 di Kabupaten Nabire ini, di sebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat dan rendahnya kepedulian masyarakat dalam tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19.

3.3 Upaya Mengatasi Faktor penghambat Kinerja Aparatur BPBD Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

3.3.1 Optimalisasi penggunaan anggaran

Berdasarkan data LAKIP yang didapat dalam upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nabire adalah pengoptimalan anggaran yang ada agar seluruh program yang ada dapat berjalan dengan baik. Salah satunya adalah dengan mengatasi kekurangannya anggaran dalam menunjang kegiatan-kegiatan khususnya di bidang tanggap darurat sehingga tidak menghambat kegiatan lapangan.

3.3.2 Meningkatkan kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan dan Pandemi COVID-19, Serta pembentukan Tim siaga bencana kampung.

Berdasarkan dari hasil LAKIP dan upaya dari BPBD untuk mengatasi hambatan-hambatan terkait kepedulian masyarakat dan upaya mengatasi luas wilayah dan jaringan antara lain; membentuk Tim siaga bencana kampung, untuk dapat membantu masyarakat menangani bencana yang akan terjadi di daerahnya. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang kepedulian akan lingkungan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nabire, sehingga diharapkan dapat membantu BPBD dalam pencegahan dini dan mengurangi dampak bencana dan pandemi COVID-19.

3.3.3 Menambah Sarana dan Prasarana Dalam Menunjang Penyelenggaraan Dalam Penanggulangan Bencana

Berdasarkan laporan tertulis pada laporan pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 yang membutuhkan penambahan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang seperti ; APD dan kantong jenazah, 2 kendaraan roda empat (ambulance untuk evakuasi), 4 kendaraan roda dua (untuk akses pelacakan), Alat TCM/PCR (kapasitas running 96 kali), 1 unit fasilitas transportasi laut.

3.3.4 Meningkatkan Kualitas pendidikan Sumberdaya Aparatur dan Kedisiplinan Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua

Upaya yang di lakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua dalam meningkatkan kualitas aparatur adalah sebagai berikut; perencanaan dan penyediaan *Call Center* (Tanggap Bencana) dalam Aplikasi berbasis internet untuk masyarakat yang dapat digunakan oleh instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melakukan pelayanan dan membantu pada sektor pelaporan bencana, kemudian kritik/saran dari masyarakat dan pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan penilai yang bersifat subjektif dapat dihindari. Memberikan sanksi yang tegas bagi para pihak pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban dan tugas, ataupun yang kehadiran dan keaktifannya kurang, seperti pemotongan tunjangan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sarana dan prasarana yaitu peralatan yang ada belum memadai, aparatur yang ada juga masih belum mencukupi, kemudian kurang profesional apatur dalam bekerja, aparatur juga belum memberikan kinerja yang cepat, sehingga bantuan yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Karawang masih terkendala dana. hal ini hampir serupa dengan hasil penelitian penulis dimana ada terdapat kendala seperti kurang memadainya sarana prasarana, dan kurangnya dana yang di akibatkan pengaruh dari pandemi COVID-19, namun penelitian penulis menfokuskan pada kinerja aparat serta identifikasi kinerja pegawai di tengah pandemi berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya yang mengenai kinerja BPBD pada saat sebelum pandemi, (Hamdani, 2017).

Sikap kerja-kerja pegawai pada bagian pelayanan publik kantor Kecamatan Langowan Barat terkendala karena faktor penyesuaian aparatur dengan keadaan yang mengharuskan mengikuti dengan protokol covid-19. Pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai Kecamatan Langowan Barat mengalami perubahan, hal ini dilihat pada jumlah pegawai yang berkurang. Hal ini hampir serupa pada hasil temuan penulis dimana pada hasil temuan penulis menemukan adanya keadaan penurunan disiplin dan kinerja pegawai di mana terpengaruh oleh pandemi COVID-19 (Wuri, 2021).

Produktivitas kinerja BPBD Kabupaten Bandung sudah cukup baik dengan adanya bantuan kepada korban banjir dan kejelasan waktu penanggulangan bencana banjir. Dengan demikian kinerja BPBD di wilayah Kecamatan Baleendah dalam penanggulangan bencana banjir dinilai sudah cukup baik. Berbeda penelitian penulis dimana kinerja aparatur BPBD kabupaten Nabire mengalami penurunan kinerja, namun kinerjanya masih terbilang bilang cukup baik dimana aparat tetap menjalankan tugas dan fungsinya di tengah pandemi COVID-19 (Candra, 2013).

Analisis data menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kinerja karyawan cenderung menurun selama masa pandemi, dan produktivitas karyawan berhubungan langsung dengan kesejahteraan karyawan pada periode ini. Sementara itu, pekerjaan rumah berkorelasi negatif dengan kinerja selama lockdown akibat kecemasan Covid-19 dan kondisi rumah seperti ergonomis, kumpul kebo, dan kesiapsiagaan. Sementara pegawai menemukan kinerja mereka rendah selama pandemi, serta mengalami penurunan produktivitas. Pada hasil temuan penulis di temukan kinerja aparatur menurun di karenakan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang di lapangan akibat imbasnya dari pandemi COVID-19 (İnce, 2020).

Pegawai BPBD memiliki kreativitas saat menanggulangi korban bencana banjir di kampung yang terkena bencana banjir. Kerjasama BPBD dilakukan dimana saja, di lokasi bencana. Pegawai BPBD memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam penanggulangan korban banjir, yang dilakukan di tempat bencana penanggulangan korban masyarakat. kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran dalam mengerjakan penanggulangan korban bencana banjir anggota BPBD yang dilakukan tidak menimbulkan korban bencana banjir meninggal dunia. BPBD bertanggung jawab dalam menanggulangi korban bencana banjir, untuk lebih dekat dengan masyarakat maka BPBD telah membentuk posko penanggulangan bencana ditiap kecamatan dan telah berjalan setelah dua tahun terbentuknya BPBD. Posko di bentuk agar masyarakat yang terkena bencana dapat segera tertolong. berbeda dengan penelitian penulis dimana pembangunan posko satgas COVID-19 mengalami keterlambatan sehingga mengakibatkan peningkatan derastis dari masyarakat yang terpapar oleh COVID-19 namun aparat sedikit demi sedikit dapat mengurangi dan penekanan dalam penyebaran COVID-19 di kabupaten Nabire(Idris, 2014)

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa; Kinerja Aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nabire Provinsi Papua di tengah pandemi COVID-19 berdasarkan pada hasil analisis observasi, dokumentasi, dan wawancara penulis, dengan menggunakan 5 aspek penilaian kinerja aparatur yang di mulai dengan kualitas hasil kerja, ketepatan waktu, inisiatif, dan komunikasi, memiliki nilai yang cukup baik. Adapun untuk aspek kemampuan, pada dimensi kemampuan aparatur dalam memenuhi target pekerjaan di nilai cukup baik, namun pada dimensi kemampuan aparatur dalam memecahkan masalah di nilai kurang. Berdasarkan hasil ini maka perlu dilakukan peningkatan kinerja aparatur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19, dalam pelaksanaannya memiliki hambatan seperti adanya Pandemi COVID-19, minimnya dana, minimnya sarana prasarana, luasnya wilayah daerah, jaringan komunikasi yang belum merata di seluruh daerah Kabupaten Nabire, kualitas dan kuantitas aparatur yang kurang, rendahnya kepedulian masyarakat terkait bencana dan pandemi COVID-19, serta daerah Kabupaten Nabire merupakan daerah yang rawan bencana yang memiliki 9 potensi bencana, dan 6 Zona merah terpapar COVID-19

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nabire Provinsi Papua telah banyak melakukan upaya dan usaha dalam menanggapi bencana dan pandemi COVID-19 di daerah. Namun dirasa belum cukup sehingga perlu di optimalkan dengan penyesuaian diri dengan bekerja di tengah pandemi

COVID-19, serta strategi, pemikiran atau ide yang inovatif, guna meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan erima kasih di tujukan terutama kepada Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Nabire beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan kesempatan dalam melaksanakan penelitian di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Serta seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hasibuan, Malayu. 2011. *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Imron, Imron. 2018. "Aspek Spiritual Dalam Kinerja." *UNIMMA PRESS*.

Kasmir. 2016. *Praktik), Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori Dan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Kaswan. 2013. *Pelatihan Dan Pengembangan*. Bandung: CV. Alfabeta.

Lexy J. Moleong, Dr. M. A. 2012. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." *PT. Remaja Rosda Karya*.

Moeheriono. 2012. *Indikator Kinerja Utama (IKU): Perencanaan, Aplikasi Dan Pengembangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Moeheriono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Nazir. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

PrabuMangkunegara, A. A. Anwar. 2013. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Priansa, Donni Juni. 2016. *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV. Alfabeta.

Priansa, Donni Juni. 2018. *Perencanaan & Pengembangan SDM*. Bandung: CV. Alfabeta.

- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*.
- Sedarmayanti. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi, Dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumiharjo. 2019. *Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur*. Jatinanggor: IPDN.
- Wibowo. 2014. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire

Peraturan Bupati Nabire Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire

Peraturan Bupati No 21 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Nabire

C. Sumber Lainnya

(WHO), World Health Organization. 2020. "Modes of Transmission of Virus Causing COVID-19: Implications for IPC Precaution Recommendations." *Geneva: World Health Organization*;

Handayani, Rina Tri et al. 2020. "Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh, Dan Herd Immunity." *Jurnal Ilmiah Stikes Kendal*.

Lakip Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire 2020

Susilo, Adityo et al. 2020. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini." *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*.

Ince, F. 2020. "The Effects of Covid-19 Pandemic on The." 6(June)

D. BERITA-BERITA

<https://jubi.co.id>. 2020a. "Abaikan Protokol Kesehatan Korona Tembus 100 Di Nabire Papua." *Di Akses Pada Tanggal 11 September 2020 Jam 10.00 WIB*.

<https://jubi.co.id>. 2020b. "Pasien Covid-19 Membeludak RSUD Nabire Mulai Kewalahan Papua." *Di Akses Pada Tanggal 9 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB*.

<https://jubi.co.id>. 2020c. "Pemkab Nabire Dinilai Lambat Atasi Pandemi Covid-19 Papua." *Di Akses Pada Tanggal 9 Oktober 2020 Pukul 10.40 WIB*.

<https://kumparan.com>. 2020. "Kantor DLH Dan BPBD Klaser Covid-19 Dibutuhkan Tracing Ketat Dan Rapi Test." *Di Akses Pada Tanggal 13 November 2020 Pukul 10.00 WIB*.

<https://ombudsman.go.id>. 2020. "Peningkatan Standar Pelayanan Publik Di Tengah Pandemi Corona." *Di Akses Pada Tanggal 6 November 2020 Pukul 09.00 WIB*.

<https://ombudsman.go.id>. 2020. "Artikel Saran Terhadap Pelayanan Publik Di Masa Pandemi Covid-19." *Di Akses Pada Tanggal 6 November 2020 Pukul 09.30 WIB*